

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN TEORI

1. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara umum pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari berbagai tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa: “Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata”.¹

Winarni (1998) mengemukakan pemberdayaan meliputi tiga hal yaitu:

“Pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan juga dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya. Disamping itu, hendaknya pemberdayaan tidak menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan

¹ Zubaedi, Wacana *Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), 42.

seharusnya harus mengantarkan pada proses kemandirian”.²

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memungkinkan seseorang atau kelompok masyarakat untuk dapat memahami dan mengendalikan situasi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan dimana ia berada. Artinya, dia terlibat secara aktif dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki taraf hidupnya, sehingga ia mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya dibawah kuasa orang serta kelompok lain dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila kondisi demikian dapat tercapai, maka diharapkan adanya keterlibatan masyarakat secara perorangan atau kelompok untuk ikut serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau meningkatkan taraf dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan juga sejalan dengan ajaran Islam, bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti dalam firman Allah Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ
اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنِّ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya: “Bagi (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah.

² Ardhitto Binadi, *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012), 24-25.

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”.³

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.⁴

b. Prinsip Pemberdayaan

Mathews mengemukakan bahwa “prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Dengan demikian, prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.⁵

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya sendiri. Oleh karenanya prinsip pemberdayaan masyarakat yang tepat saat

³ Al Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 250.

⁴ Andi Sopandi, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat,” *Jurnal Madani* 1, no. 2 (2009): 82.

⁵ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

ini adalah dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masyarakat.⁶ Menurut beberapa ahli ada empat prinsip dalam pemberdayaan yaitu:

1.) Prinsip Kesenjangan

Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing individu saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman, dan saling memberi dukungan. Pada akhirnya seluruh individu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya.⁷

2.) Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Untuk sampai pada tingkat tersebut perlu proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Artinya, masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan itu mendapatkan arahan yang jelas dari pendamping, sehingga mampu memotivasi dirinya untuk mengembangkan

⁶ Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, ... 108.

⁷ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman, CV Budi Utama, 2019), 11.

potensi yang ada dalam setiap masing-masing individu. Pada akhirnya masing-masing individu masyarakat tersebut mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya secara layak.⁸

3.) Prinsip Keswadayaan dan Kemandirian

Prinsip Keswadayaan ialah lebih menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan "*the have not*" melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit "*the have little*".

Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan sebagai modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya.

Individu dari masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan diharapkan dapat dan mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya dan tidak bergantung pada pihak manapun.

4.) Prinsip Berkelanjutan

Program pemberdayaan dirancang supaya bisa berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat sendiri.

⁸ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 12.

Secara perlahan dan pasti peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Artinya pemberdayaan ini dirancang sedemikian rupa. Secara bertahap, program itu mampu memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman serta keterampilan pada setiap individu yang terlibat dalam program pemberdayaan tersebut. Kemudian, masing-masing individu mampu menggali dan mengembangkan potensi mereka untuk melakukan aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.⁹

c. Tujuan Pemberdayaan

Menurut Mardikanto (2015), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1.) Perbaikan Kelembagaan “*Better Insitution*”

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, dapat memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha. Kelembagaan yang baik akan mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan kelembagaan yang ada, sehingga lembaga tersebut dapat secara maksimal menjalankan fungsinya. Dengan demikian tujuan lembaga tersebut akan mudah dicapai. Target-target yang telah disepakati oleh seluruh anggota dalam lembaga tersebut mudah direalisasikan.¹⁰

2.) Perbaikan Usaha “*Better Business*”

Setelah kelembagaan mengalami perbaikan, maka diharapkan berimplikasi kepada adanya perbaikan bisnis dari lembaga tersebut. Di samping itu kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan yang

⁹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 12.

¹⁰ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 8.

mampu memberikan kepuasan kepada seluruh anggota lembaga tersebut dan juga memberikan manfaat yang luas kepada seluruh lembaga masyarakat yang ada di sekitarnya. Hal ini juga diharapkan mampu mengembangkan lembaga tersebut, sehingga mampu memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh seluruh anggota yang bersangkutan.

3.) Perbaikan Pendapatan “*Better Income*”

Perbaikan bisnis diharapkan akan berimplikasi kepada peningkatan pendapatan atau *income* dari seluruh anggota lembaga tersebut. Dengan kata lain terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.¹¹

4.) Perbaikan Lingkungan “*Better Environment*”

Lingkungan pada saat ini banyak mengalami kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal bila kualitas manusia tinggi, yang salah satu faktornya adalah memiliki pendidikan yang tinggi atau memiliki inteektual yang baik. Maka manusia tidak akan merusak lingkungan.

Pendapatan masyarakat harus memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Bila kemiskinan terjadi, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, kemungkinan manusia melakukan tindakan yang merusak lingkungan, karena terdesak untuk menghidupi diri dan keluarganya. Jadi perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan “fisik dan sosial” karena kerusakan lingkungan

¹¹ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 9.

seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan terbatas.¹²

5.) Perbaikan Kehidupan “Better Living”

Tingkat kehidupan masyarakat dapat dilihat dari berbagai indikator atau berbagai faktor. Diantaranya tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan atau daya beli masing-masing keluarga. Dengan pendapatan yang membaik, diharapkan ada korelasi dengan adanya lingkungan yang membaik pula. Pada akhirnya pendapatan dan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6.) Perbaikan Masyarakat “Better Community”

Bila setiap keluarga mempunyai kehidupan yang baik, maka akan menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan “fisik dan sosial” yang lebih baik, sehingga diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹³

2. Pemberdayaan Perempuan(Ibu Rumah Tangga)

a. Perempuan dan Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan juga mempunyai hak yang sama. Akih (2006:71) mengemukakan bahwa gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural.

¹² Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 10.

¹³ Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 10.

Dalam Islam juga terdapat prinsip persamaan derajat antar umat manusia. Islam telah memploklamirkan persamaan derajat antar umat manusia sejak 14 abad yang lalu. Seperti yang terdapat Al Qur'an firman Allah SWT dalam surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”*¹⁴

Ayat diatas menegaskan persamaan derajat antar manusia. Dan bahwa kemuliaan disisi Allah hanyalah berdasarkan iman dan takwa. Ayat diatas juga menekankan bahwa pada dasarnya antara laki-laki dan juga perempuan sudah seharusnya tidak terpecah-belah akan tetapi saling tolong-menolong dan juga saling membantu antara satu sama lain.

Kesetaraan gender memiliki kaitan dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi

¹⁴ Al Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 516.

baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Sehingga dalam hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.¹⁵ Teori tentang kesetaraan gender dibagi dalam beberapa kajian teori diantaranya:

1.) Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).¹⁶

2.) Teori Nature

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu

¹⁵ Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa,” *Jurnal Equilibrium* 3, no. 1 (2015): 87-88.

¹⁶ Rudi Aldianto, “Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa,” . . . 89.

pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nahkoda. Talcott Persons dan Bales (1979) berpendapat bahwa keluarga adalah sebuah unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antar perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

3.) Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus berkerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.¹⁷

Perjanjian Internasional, yaitu Konvensi Perempuan juga menekankan pada prinsip

¹⁷ Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa," ... 90.

persamaan dan keadilan (*equality* dan *equity*) dan didasarkan diantaranya pada prinsip persamaan substantif, artinya bertujuan:

- 1.) Mengatasi perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan.
- 2.) Menciptakan kesempatan dan akses bagi perempuan yang sama dengan laki-laki serta menikmati manfaat yang sama.
- 3.) Hak hukum, persamaan kedudukan dalam hukum, dan perlakuan yang sama di muka hukum.¹⁸

b. Pengertian Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan menurut Kartasasmita adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap budaya, kemiskinan, dan keterbelakangan serta mampu memandirikan perempuan sebagai warga masyarakat yang sejajar dengan kaum laki-laki.¹⁹

Pemberdayaan perempuan menurut Karls yang dikutip oleh Keppi Sukei adalah proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar seperti kekuasaan, pengawasan, pengambilan keputusan serta tindakan transformasi yang mengarahkan pada perwujudan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki.²⁰

Dari pengertian di atas, maka pemberdayaan perempuan dapat juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dengan cara mengembangkan potensi yang dimiliki dengan upaya memberikan peluang dan kesempatan bagi perempuan untuk mandiri dan mampu menentukan masa depan yang akan

¹⁸ Wahyuningsih, "Prinsip Kesetaraan Gender dan Non Diskriminasi dalam Konvean ICESCR dan ICCPR," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 1 (2008): 22.

¹⁹ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik . . .*, 74-75.

²⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo, 1996), 206-207.

mereka pilih. Dengan demikian dapat menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan juga kesejahteraan perempuan.

c. Proses Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan adalah proses yang alamiah, dalam arti kita alami dalam kehidupan wajar kita sehari-hari. Begitu alamiahnya pemberdayaan kita lupa bahwa proses itu sangat penting. Pemberdayaan perempuan merupakan sebuah “proses menjadi” bukan “proses instan”. Oleh karena itu, pemberdayaan sebagai “proses menjadi”, maka dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan tenang yang cukup melelahkan. Pengertian proses merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertambahan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.²¹

Wrihatnolo membagi beberapa tahapan pemberdayaan, tahapan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1.) Penyadaran

Pada tahap ini target yang hendak diberdayakan diberikan pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu. Misalnya, target adalah kelompok masyarakat miskin. Kemudian, mereka diberikan pemahaman bahwa mereka dapat menjadi berada, dan itu dapat dilakukan jika mereka mempunyai kapasitas untuk keluar dari kemiskinan. Dalam tahap ini membuat perempuan mengerti dan memahami terhadap permasalahan yang mereka alami, sehingga mereka perlu diberdayakan dan proses

²¹ Randi Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2007), 8-9.

pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri perempuan itu sendiri bahwa mereka dapat merubah nasib mereka kearah yang lebih baik dan bukan dari orang lain.²²

2.) Pengkapasitasan

Tahap kedua inilah yang disebut “*capacity building*”, atau dalam bahasa yang lebih sederhana memampukan atau “*enabling*”. Untuk memberikan daya atau kekuasaan, yang bersangkutan harus mampu terlebih dulu. Misalnya, sebelum memberikan suatu pekerjaan kelompok sasaran harus dilatih terlebih dahulu supaya mereka “cakap” (*skilfull*) dalam mengelola pekerjaan tersebut. Pada tahap ini, perempuan sebelum melakukan pekerjaan yang akan mereka lakukan diberi *training* atau pelatihan terlebih dahulu agar mereka dapat terampil dalam pekerjaan tersebut atau bahkan mereka dapat memberi inovasi baru.

3.) Pemberian Daya

Tahap ketiga ini adalah pemberian daya itu sendiri atau “*empowerment*”. Pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang. Pemberian daya atau kekuasaan ini sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki. Pada tahap ini setelah melalui tahap penyadaran dan pengkapasitasan kelompok perempuan diberikan peluang dan kesempatan. Misalnya, mereka memiliki keinginan untuk membuka usaha dengan pemberian modal yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan dirasa

²² Randi Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 3-5.

cukup untuk langkah pertama apabila mereka ingin membuka usaha sendiri.²³

Dalam pemberdayaan terdapat dua kecenderungan yaitu:

- 1.) Pemberdayaan menekankan pada proses atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya.
- 2.) Pemberdayaan menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.²⁴

d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan

Dalam konteks pemberdayaan bagi perempuan, menurut Parons sebagaimana dalam Edi Suharto mengajukan tiga tolak ukur keberhasilan pemberdayaan:

- 1.) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- 2.) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri dan berguna bagi orang lain.
- 3.) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.²⁵

²³ Randi Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, . . . 5-7.

²⁴ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora, 2001), 43.

²⁵ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 58.

Sedangkan, UNICEF mengajukan 5 dimensi sebagai tolak ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol. Lima dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.²⁶ Berikut adalah uraian lebih rinci dari masing-masing dimensi:

1.) Kesejahteraan

Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

2.) Akses

Dimensi ini menyangkut kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh adanya sumber daya. Tidak adanya akses merupakan penghalang terjadinya peningkatan kesejahteraan. Kesenjangan pada dimensi ini disebabkan oleh tidak adanya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas lebih tinggi dibanding mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya dapat berupa waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3.) Kesadaran Kritis

Kesenjangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat bukanlah tatanan alamiah yang berlangsung demikian sejak kapanpun atau semata-mata memang kehendak Tuhan, melainkan bersifat struktural sebagai

²⁶ Endah Setyowati dkk, "Keberdayaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," *Jurnal Pendidikan Non Formal* 11, no. 2 (2016): 105.

akibat dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat pada tingkat ini berarti berupa kesadaran masyarakat bahwa kesenjangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diubah.

4.) Partisipasi

Keberdayaan dalam tingkat ini adalah masyarakat terlibat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut andil dalam proses pengambilan keputusan dan dengan demikian maka kepentingan mereka tidak terabaikan.

5.) Kontrol

Keberdayaan dalam konteks ini adalah semua lapisan masyarakat ikut memegang kendali terhadap sumber daya yang ada. Artinya, dengan sumber daya yang ada, semua lapisan masyarakat dapat memenuhi hak-haknya, bukan hanya segelintir orang yang berkuasa saja yang menikmati sumber daya, akan tetapi semua lapisan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat dapat mengendalikan serta mengelola sumber daya yang dimiliki.²⁷

Professor Gunawan Sumodiningrat yang dikutip Riant Nugroho (2008) menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan yaitu:

- 1.) Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- 2.) Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.

²⁷ Endah Setyowati dkk, "Keberdayaan Masyarakat Desa Hutan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)," . . . 106.

- 3.) Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.²⁸

3. Kelompok

a. Pengertian Kelompok

Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Menurut Prof Soerjono Soekanto kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena adanya hubungan antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Sedangkan kelompok menurut Hendropuspito adalah kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama.²⁹

b. Ciri-ciri Kelompok

Menurut Soerjono Soekanto, himpunan orang data dikatakan sebagai kelompok apabila memiliki beberapa persyaratan atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1.) Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan.
- 2.) Ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lainnya di kelompok itu.
- 3.) Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok, sehingga ada hubungan diantara mereka bertambah erat. Faktor itu dapat berupa

²⁸ Roza Linda, "Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Pelatihan Ketrampilan Menyulam Pada Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Sumber Rezeki Kelurahan Tangkerang Labuhai," *Jurnal Marwah* 14, no. 2 (2015): 165.

²⁹ Heni Wiludjeng, Rianto Adi, *Sosiologi*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 56.

kepentingan yang sama, tujuan yang sama, dan ideologi politik yang sama.

- 4.) Memiliki struktur sosial sehingga kelangsungan hidup kelompok tergantung pada kesungguhan anggotanya dalam melaksanakan perannya.
- 5.) Memiliki norma-norma atau kaidah yang mengatur hubungan diantara para anggotanya.
- 6.) Memiliki pola perilaku yang sama.
- 7.) Memiliki sistem tertetu dan berproses.³⁰

c. **Faktor Pembentukan Kelompok**

Faktor yang mendasari terbentuknya kelompok antara lain adalah sebagai berikut:

1.) Kedekatan

Kedekatan fisik meningkatkan peluang interaksi dan bentuk kegiatan bersama yang memungkinkan terbentuknya suatu kelompok. Kedekatan menumbuhkan interaksi yang memainkan peranan penting terhadap terbentuknya suatu kelompok pertemanan.

2.) Kesamaan

Biasanya orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan minat, kepercayaan, nilai, kepentingan, keturunan, daerah, maupun karakter-karakter personal lainnya.³¹

d. **Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Kualitas Kelompok**

Kelompok yang baik akan terwujud apabila para anggotanya saling bersikap sebagai kawan dalam arti yang sebenarnya. Berbagai kualitas positif yang ada dalam kelompok itu “bergerak” dan “bergulir” yang menandai dan mendorong kehidupan kelompok. Kekuatan yang mendorong dalam kehidupan kelompok ini dikenal

³⁰ Heni Wiludjeng, Rianto Adi, *Sosiologi*, . . . 57.

³¹ Heni Wiludjeng, Rianto Adi, *Sosiologi*, . . . 58.

dengan sebutan dinamika kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas kelompok yaitu:

- 1.) Tujuan dan kegiatan kelompok
- 2.) Jumlah anggota
- 3.) Kualitas pribadi masing-masing kelompok
- 4.) Kedudukan kelompok
- 5.) Kemampuan kelompok dalam memenuhi kebutuhan anggota untuk saling berhubungan sebagai kawan, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan bantuan moral, dan sebagainya.³²

e. Jenis-jenis Kelompok

Menurut Soerjono Soekanto, kelompok dibagi menjadi enam jenis. Enam jenis itu antara lain adalah sebagai berikut:

- 1.) Berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota.

Besar kecilnya anggota kelompok akan mempengaruhi kelompok dan pola interaksi sosial dalam kelompok tersebut. Jadi, semakin banyak jumlah anggota kelompoknya semakin beragam pula pola interaksinya.

- 2.) Berdasarkan pada kepentingan dan wilayah.

Misalnya komunitas dan asosiasi. Sebuah masyarakat setempat (komunitas) merupakan suatu kelompok atas dasar wilayah yang tidak mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan asosiasi (*association*) adalah sebuah kelompok yang dibentuk untuk memenuhi kepentingan tertentu.

- 3.) Berdasarkan pada derajat organisasi.

Misalnya kelompok terorganisasi dan kelompok tidak terorganisasi. Kelompok yang terorganisasi seperti TNI, perusahaan, dan sebagainya. Namun, ada juga kelompok yang hampir tidak terorganisasi seperti kerumunan orang.

³² Prayitno, *Layanan Bimbingan Kelompok dan Konseling Kelompok*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017) 29-33.

- 4.) Berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama.

Terdiri atas *in-group* dan *out-group*. *In-group* adalah kelompok tempat seseorang menidentifikasi dirinya, sedangkan *out-group* (kelompok luar) adalah kelompok yang menjadi lawan dari *in-group*.

- 5.) Berdasarkan hubungan sosial dan tujuan.

Misalnya kelompok primer/paguyuban dan kelompok sekunder/patembayan. Kelompok primer/paguyuban seperti keluarga, rukun tetangga, merupakan kelompok yang anggotanya saling mengenal dengan baik. Sedangkan kelompok sekunder/patembayan, seperti masyarakat kota, para anggotanya tidak memiliki hubungan yang erat satu sama lain.³³

4. Tinjauan Tentang Batik

a. Pengertian Batik

Batik berasal dari bahasa Jawa yaitu “amba” atau menulis dan “titik”. Batik adalah kerajinan yang mengandung filosofi, memiliki karakter dan nilai seni, serta menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak lama. Sebagai ikon budaya, batik merupakan *local genius* yang mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Batik adalah sejenis kain tertentu yang dibuat khusus dengan motif-motif yang khas, yang langsung dikenali masyarakat umum. Batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.

Batik merupakan wujud hasil cipta karya seni yang adiluhung, diekspresikan pada motif kain untuk pakaian, sarung, kain panjang, dan kain dekoratif lainnya. Secara harfiah batik dijelaskan

³³ Heni Wiludjeng, Rianto Adi, *Sosiologi*, . . . 58-60.

sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menorehkan malam (lilin) pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu. Teknik pembuatan batik dikerjakan dengan cara cap, printing (sablon), kain tekstil bercorak batik, batik dengan computer, serta batik tulis.

Awal pengenalan batik di Indonesia melalui proses asimilasi kebudayaan dengan pendatang Cina dan India, kemudian dengan penduduk pribumi. Sejalan dengan perkembangan nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia, batik hasil karya seni tumbuh dan berkembang menjadi kekayaan nasional yang bernilai tinggi dan telah mendapatkan pengakuan dari PBB melalui UNESCO sebagai warisan budaya dunia (*Intangible Cultural Heritage*) yang dihasilkan oleh Indonesia. Selama ini orang hanya mengetahui bahwa pulau Jawa, khususnya di kota Solo, Yogyakarta, atau Pekalongan adalah pusat kebudayaan batik. Padahal di luar ketiga kota itu masih banyak daerah lain yang punya budaya dan seni batik yang tentunya masing-masing punya motif dan corak tersendiri.³⁴

b. Tujuan dan Fungsi Membatik

Batik memiliki fungsi fisis selain mengungkapkan nilai artistik yang memberikan kepuasan batin. Namun sesuai dengan beriringnya waktu dan tempaan situasi dan kondisi, batik menjadi salah satu komodita perdagangan yang diminati hingga kini. Salah satu fungsi batik adalah sebagai busana kebesaran keluarga keratin dan keperluan adat seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian. Perkembangan fungsi batik selanjutnya berkembang kedalam berbagai bidang kebutuhan busana, perlengkapan rumah tangga dan arsitektur. Ragam hiasan batik sangat

³⁴ Ari Wulandari, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011), 42-49.

banyak jumlahnya dan hadir dalam ungkapan seni rupa yang sangat beragam, baik dalam variasi bentuk maupun warna. Hal tersebut menjadikan setiap daerah pembatikan tampil dalam ciri-ciri dan khasnya masing-masing.³⁵

c. Jenis-jenis Batik

Jenis batik di Indonesia sangatlah bermacam-macam. Berbagai pengaruh dari tradisi klasik sampai yang modern dan abstrak ikut menyemarakkan jenis-jenis batik di Indonesia. banyaknya jenis batik di Indonesia juga disebabkan karena batik telah lama berada di Indonesia. Batik dapat dibedakan berdasarkan teknik pembuatan menjadi 4 (empat) yaitu:

1.) Batik Tulis (*Hand Drawn Batik*)

Dikerjakan dengan menggunakan canting. Bentuk gambar pada batik tulis tidak ada pengulangan yang jelas, sehingga gambar nampak bisa lebih luwes dengan ukuran garis motif yang relatif bisa lebih kecil dibandingkan dengan batik cap. Warna dasar kain lebih muda dibandingkan dengan warna pada goresan motif. Waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan batik tulis lebih lama. Harga jual batik tulis relatif lebih mahal karena kualitasnya lebih bagus dan mewah.

2.) Batik Cap (*Hand Stamp Batik*)

Dikerjakan dengan menggunakan cap. Bentuk gambar atau desain pada batik cap selalu ada pengulangan dengan bentuk yang sama, dengan ukuran garis motif relatif lebih besar dibandingkan dengan batik tulis. Gambar batik cap biasanya tidak tembus pada kedua sisi kain. Wana dasar kain biasanya lebih tua dibandingkan dengan warna pada goresan motifnya. Harga jual batik cap lebih

³⁵ Ari Wulandari, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, . . . 54.

murah karena kurang unik dan kurang eksklusif.

3.) Batik Kombinasi Tulis dan Cap

Kombinasi ini merupakan gabungan dari teknik cap dan tulis. Hal ini bertujuan untuk mempercepat produksi batik dan keseragaman.

4.) Batik Lukis

Batik yang dibuat tanpa pola, tetapi langsung meramu warna di atas kain. Gambar yang dibuat seperti halnya lukisan bisa berupa pemandangan, cerita pewayangan dan lainnya, bahkan media selain kain berupa kayu atau juga bisa digunakan.³⁶

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nika Rizqi Fitriana (2016), dengan judul “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Usaha Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)”. Penelitian ini menggunakan Kualitatif deskriptif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik triangulasi data. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Latar belakang dalam skripsi dari Nika Rizqi Fitriana yaitu, untuk mengetahui peran anggota perempuan Kelompok Usaha Bersama (KUB).³⁷

Hasil penelitian tersebut yaitu KUB Serang tidak hanya memproduksi batik dalam bentuk lembaran saja, akan tetapi KUB Serang sudah berani membuat inovasi produk. Faktor-faktor pendukung

³⁶ Ari Wulandari, *Batik Nusantara: Makna Filosofis, Cara Pembuatan dan Industri Batik*, . . . 55-60.

³⁷ Nika Rizqi Fitriana, “Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan),” Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2016), 47.

perempuan dalam mengembangkan (KUB) Serang adalah adanya motivasi perempuan, dukungan keluarga serta dukungan pemerintah yang membuat perempuan semakin antusias menjalankan usaha bersama. Faktor-faktor penghambat adalah kurangnya modal uang dan bahan baku, serta permintaan pasar yang masih tergantung di wilayah Kabupaten Grobogan. Persamaan penelitian adalah sama-sama meneliti terkait dengan pemberdayaan perempuan. Perbedaannya peneliti mengambil penelitian di salah satu sentra batik yang ada di Desa Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh Nika Rizqi Fitriana bertempat di Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Marisarya Supriyanti (2017), dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industry Batik Tulis Desa Plana Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas).” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis deskriptif kualitatif yang terdiri atas tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Latar belakang dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui (1) Pemberdayaan perempuan pedesaan dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui home industry batik tulis di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, (2) Pemberdayaan perempuan pedesaan perspektif ekonomi islam dalam meningkatkan pendapatan keluarga melalui home industry batik tulis di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas.³⁸

³⁸ Merisarya Supriyanti, “Pemberdayaan Perempuan Pedesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Home industry Batik Tulis di Desa Plana, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas)”, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017), 75.

Hasil penelitian tersebut adalah pemberdayaan perempuan melalui Home Industry batik tulis ambil bagian dalam menambah pendapatan keluarga. Kontribusi pendapatan perempuan terhadap pendapatan keluarga meningkat cukup signifikan, yaitu dari pendapatan suami rata-rata hanya Rp.500.000 sampai Rp.750.000 meningkat menjadi 1.250.000 sampai 1.750.000 setelah mendapat istri. Perempuan pengrajin batik tulis rata-rata bekerja sehari selama 5 sampai dengan 8 jam. Namun demikian waktu yang dialokasikan tersebut relatif fleksibel. Kedua, dalam perspektif ekonomi islam, pemberdayaan perempuan pada home industri batik tulis sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam islam, diantaranya (1) tidak boleh melalaikan tugasnya di sektor domestik dan (2) mendapatkan izin dari suaminya, dalam menetapkan upah, home industri batik tulis menggunakan sistem upah dan sebaliknya. Sistem upah ini telah sesuai dengan syariat Islam yang menganjurkan agar gaji yang diterima oleh pengrajin, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan desa. Perbedaan peneliti lebih memfokuskan pada pemberdayaan perempuan melalui kelompok batik bakaran yang ada di desa Bakaran Kulon Juwana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Marisatya Supriyanti lebih memfokuskan pada pendapatan yang didapat melalui Home industry.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Sarjito (2013), dengan judul “Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Petani Kecil (KPK) Ngudi Lestari di Mendongan Bandung Playen Gunungkidul Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Latar belakang dalam ini adalah

bagaimana pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan ekonomi keluarga di dalam Kelompok Petani Kecil Ngudi Lestari yang ada di Dusun Mendongan, Desa Bandung, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta.³⁹

Hasil dari penelitian ini adalah program pemberdayaan yang perempuan di KPK Ngudi Lestari meliputi beberapa aspek yaitu aspek pengetahuan dan ekonomi. Dalam aspek pengetahuan penerima program pemberdayaan saat ini memiliki keterampilan dalam mengolah hasil pertanian menjadi berbagai macam olahan serta mendapatkan wawasan dalam bidang kewirausahaan yang menjadi modal untuk membuka usaha sendiri. Manfaat dalam aspek ekonomi yaitu ditandai dengan meningkatnya penghasilan bagi penerima program pemberdayaan yang telah mengikuti kegiatan usaha produksi pengolahan hasil pertanian yang dilaksanakan di kelompok KPK Ngudi Lestari maupun anggota kelompok yang telah membuka usaha sendiri sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi keluarga. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan perekonomian di dalam keluarga. Perbedaannya peneliti melakukan penelitian dan lebih memfokuskan pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Batik Bakaran sedangkan penelitian oleh Agung Sarjito meneliti pemberdayaan perempuan melalui Kelompok Petani Kecil (KPK).

C. Kerangka Berpikir

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang mengharapkan untuk terwujud adanya sebuah perubahan. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui

³⁹ Agung Sarjito, *"Pemberdayaan Perempuan Untuk Meningkatkan Ekonomi Keluarga Melalui Kelompok Petani Kecil (PKK) Ngudi Lestari di Mendongan Bandung Playen Gunungkidul Yogyakarta,"* Skripsi (Yogyakarta: Univesitas Negeri Yogyakarta, 2013), 24.

pengembangan kemampuan masyarakat. Dalam hal ini, Kelompok Batik Bakaran muncul sebagai salah satu penyedia sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan perempuan perlu diupayakan melihat potensi yang ada dimana perempuan di Desa Bakaran memiliki keterampilan dalam membatik, apalagi keterampilan tersebut telah diturunkan oleh keluarga mereka secara turun-temurun. Pemberdayaan perempuan di Desa Bakaran Kulon dilakukan oleh Kelompok Batik Bakaran yang bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan bakat dalam berkarya, meningkatkan keahlian dan keterampilan, serta meningkatkan kemandirian para Ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Bakaran Kulon Juwana dalam berkarya sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya.

Dilihat dari segi pemberdayaan, kegiatan ini merupakan pemberdayaan perempuan yang sangat efektif. Alasannya adalah para Ibu-ibu rumah tangga masih dapat membagi waktu antara mengurus keluarga dan membatik serta dapat juga mengembangkan bakat dan kreativitas yang mereka miliki. Berikut adalah skema kerangka berpikir dalam penelitian ini.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Berpikir

